

PENINGKATAN PELAPORAN TUNJANGAN DAN PAJAK DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

Salma Maulani¹⁾, Melati Budi Srikandi²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional

²⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Nasional

maulanisalma9@gmail.com

Abstract

The Public Housing and Settlement Area Office is one of the offices that plays an important role in the Badung Regency Government Center. The reporting of allowances and taxes is an important factor in the agency. However, there are problems experienced by the Public Housing and Settlement Area Office, including delays in reporting allowances and taxes, as well as inaccuracies in reporting allowances and taxes. To overcome these problems, the way that can be done is to implement an online allowance and tax reporting system. This will make it easier for employees to upload documents directly through a system managed by the Regional Audit and Assets Agency (BPKAD). In addition, the Public Housing and Settlement Areas Office needs to increase the capacity of human resources through adequate training. The type of data used in this service is qualitative data collected through direct observation and in-depth interviews with employees in the Financial Planning Reporting (PKP) section. With the realization of the improvements and applications made, it is hoped that a more transparent, accurate and timely system can be created. Thus, it can increase efficiency and public accountability and can form human resources who are trained in using new information and communication technology.

Keywords: Office of Public Housing and Settlement Areas, Allowance Reporting, Tax Reporting and Improvement.

Abstrak

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah salah satu dinas yang berperan penting di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Pelaporan tunjangan dan pajak menjadi faktor penting di dalam dinas tersebut. Namun, terdapat permasalahan yang dialami oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, di antaranya keterlambatan pelaporan tunjangan dan pajak, serta ketidakakuratan pelaporan tunjangan dan pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, cara yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem pelaporan tunjangan dan pajak secara online. Hal ini akan memudahkan pegawai saat melakukan pengunggahan dokumen secara langsung melalui sistem yang dikelola oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang memadai. Jenis data yang digunakan dalam pengabdian ini adalah data kualitatif yang dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pegawai di bagian Perencanaan Keuangan Pelaporan (PKP). Dengan terwujudnya peningkatan dan penerapan yang dilakukan, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih transparan, akurat, dan tepat waktu. Sehingga, mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas publik serta dapat membentuk sumber daya manusia yang terlatih dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang baru.

Keywords: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pelaporan Tunjangan, Pelaporan Pajak, dan Peningkatan.

PENDAHULUAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Badung memiliki harapan besar untuk mengoptimalkan pengelolaan tunjangan dan pelaporan pajak. Harapan ini meliputi terciptanya sistem yang lebih transparan, akurat, dan tepat waktu, sehingga mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan akuntabilitas publik (Utami 2023). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat terbangun sebuah sistem informasi manajemen yang terintegrasi, mampu memberikan akses data secara realtime, dan meminimalisir kesalahan manual (Wibowo and Tomi 2020). Selain itu, adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan profesional diharapkan mampu menunjang kinerja staf dalam menjalankan tugas pelaporan dengan lebih baik. Pada akhirnya, dengan sistem yang efisien dan staf yang terlatih, diharapkan mampu mewujudkan pelaporan yang tepat waktu dan akurat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat meningkat (Baharuddin, Musa, and Burhanuddin 2022).

Secara teori, pelaporan tunjangan dan pelaporan pajak yang efektif dan efisien didasari oleh beberapa konsep dasar dalam manajemen publik dan teknologi informasi (Akhadi 2023). Pertama, teori manajemen publik menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi (Utami 2023), termasuk dalam pengelolaan tunjangan dan pajak. Transparansi ini dapat dicapai dengan penerapan sistem informasi yang memungkinkan pelacakan dan verifikasi

data secara mudah dan akurat. Kedua, teori sistem informasi manajemen menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses pelaporan (Erwin, Mukti, and Judijanto 2024).

Dalam praktiknya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung terus berupaya untuk mencapai harapan tersebut meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Ketidakakuratan data yang dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan kebutuhan untuk terus menyempurnakan sistem verifikasi yang ada. Keterlambatan dalam pelaporan juga masih menjadi perhatian, yang mana ini sering kali diakibatkan oleh kompleksitas proses administrasi serta tantangan dalam mengadopsi teknologi baru (Senastri 2024). Meski demikian, Dinas ini secara aktif berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan tunjangan dan pajak, serta memastikan bahwa proses pelaporan berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Melalui upaya ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung optimis dapat mengatasi berbagai tantangan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Optimalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan meningkatkan akuntabilitas publik, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih serta peningkatan kapasitas sumber

daya manusia melalui pelatihan profesional akan memungkinkan pelaporan yang lebih tepat waktu dan mengurangi kesalahan manual (Rijal et al. 2023). Hal ini penting dalam mengatasi tantangan ketidakakuratan data dan keterlambatan pelaporan, yang sering menghambat kinerja administrasi publik.

METODE

Bagian ini menguraikan metode yang digunakan, meliputi prosedur pelaksanaan, alat, bahan, media dan instrumen yang digunakan. Pendekatan yang dipilih adalah jenis kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai masalah pengelolaan tunjangan dan pelaporan pajak di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

Prosedur Pelaksanaan:

1. Observasi: Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pelaporan tunjangan dan pajak di bagian Perencanaan Keuangan Pelaporan (PKP). Observasi ini membantu dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan.
2. Wawancara: Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pegawai di bagian PKP. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih detail mengenai masalah yang dihadapi dan pandangan mereka terhadap solusi yang diusulkan.

Alat tulis dan rekaman digunakan untuk mencatat hasil observasi dan mendokumentasikan

wawancara sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat. Dokumen dan laporan terkait, seperti peraturan tentang tunjangan anak dan pajak, serta prosedur pelaporan yang berlaku di dinas tersebut, dianalisis sebagai bahan referensi.



Gambar: Foto Bersama Pegawai Sub. Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan (PKP)
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

Panduan wawancara yang terdiri dari daftar pertanyaan terbuka mengenai proses pelaporan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diusulkan, dirancang untuk memastikan wawancara berjalan terstruktur dan mendalam. Kisi-kisi dari instrumen wawancara disusun untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi para pewawancara, mencakup aspek-aspek seperti sistem pelaporan, kendala teknis, dan kompetensi pegawai.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan saat ini, mengidentifikasi pola, dan memahami masalah secara lebih komprehensif. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang tepat guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan tunjangan dan pajak di dinas tersebut.

PEMBAHASAN

1. Analisis Pembahasan

Tunjangan adalah suatu komponen di luar penghasilan atau gaji pokok yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan (OCBC 2022). Tunjangan tersebut dianggap sebagai hak

karyawan dan kewajiban bagi perusahaan. Pemberian tunjangan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi dapat juga dalam bentuk fasilitas lain seperti kendaraan khusus, perjalanan dinas, atau asuransi Kesehatan. Salah satu tunjangan yang harus dilaporkan setiap tahun yaitu Tunjangan Anak.

Perpajakan merupakan pungutan keuangan wajib yang dikenakan kepada warga negara dan dibayarkan kepada pemerintah negara. Merupakan kewajiban bagi semua orang di Indonesia untuk memastikan bahwa negara dapat menghasilkan pendapatan dan melaksanakan proyek pembangunan. Pajak dipungut sesuai dengan norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa publik dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Dalam proses melaporkan tunjangan anak dan lapor pajak, terdapat alur pelaporannya. Tunjangan anak diterima sebesar 2% dari gaji pokok, berlaku untuk maksimal tiga orang anak, termasuk satu orang anak angkat. Tunjangan ini diberikan hingga anak menginjak usia 21 tahun, dengan ketentuan anak tersebut belum menikah dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Tunjangan dapat diperpanjang hingga usia 25 tahun jika anak tersebut masih sekolah dan tidak memiliki penghasilan. Proses pelaporan tunjangan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Anak yang memenuhi syarat harus membuat surat keterangan sekolah atau kuliah.
- 2) Surat keterangan ini kemudian diserahkan kepada orang tua yang bekerja sebagai pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
- 3) Orang tua tersebut kemudian menyetorkan berkas surat keterangan tersebut kepada

Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

- 4) Pelaporan ini harus dilakukan secara rutin setiap tahun. Jika terlambat melapor, pemberian tunjangan akan diputus.

Sedangkan proses Pelaporan pajak dapat dilakukan secara online melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online. Proses pelaporan adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai melakukan pelaporan pajak sendiri melalui sistem DJP Online.
- 2) Jika terjadi kesalahan input data, pegawai harus mendatangi kantor pajak untuk mengurus perubahan data.
- 3) Setelah selesai, pegawai melakukan pembetulan dan kembali menginput ulang melalui sistem DJP Online.
- 4) Pelaporan pajak harus dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Jika terlambat, pegawai akan dikenakan denda.

2. Analisis Permasalahan

2.1 Analisis

Ketidakakuratan Data dalam Pelaporan Tunjangan dan Pajak

Ketidakakuratan pelaporan tunjangan dan pajak di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, human error atau kesalahan manusia sering menjadi sumber ketidakakuratan. Kesalahan input data, seperti salah ketik atau salah memasukkan angka, dapat terjadi karena kelelahan, kurang perhatian, atau keterbatasan waktu. Selain itu, pemahaman petugas tentang pentingnya keakuratan data atau cara memasukkan data dengan benar juga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan. Kelalaian, seperti terburu-buru

menyelesaikan tugas tanpa pengecekan yang memadai, juga menjadi salah satu faktor penyebab ketidakakuratan data.

Sistem manual saat ini sangat rentan terhadap kesalahan. Sistem ini rentan terhadap kerusakan dokumen fisik, kehilangan data, dan keterbatasan ruang penyimpanan. Selain itu, proses verifikasi data manual memakan waktu dan sering kali tidak efektif dalam mendeteksi kesalahan, sehingga meningkatkan kemungkinan ketidakakuratan. Kurangnya teknologi yang memadai juga merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap ketidakakuratan data. Tanpa sistem yang terintegrasi, data sering kali disimpan di berbagai lokasi terpisah, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dan kesulitan dalam mengakses data yang diperlukan dengan cepat. Mengandalkan proses manual semakin meningkatkan kemungkinan kesalahan, sementara tidak adanya cadangan data elektronik meningkatkan risiko kehilangan data karena bencana alam, kebakaran, atau kerusakan lainnya.

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang tidak memadai merupakan faktor krusial. Staf mungkin tidak menerima pelatihan yang memadai tentang cara menggunakan teknologi informasi yang ada atau prosedur baru yang sedang diterapkan. Kurangnya program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan mengakibatkan staf tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola data secara efektif. Selain itu, staf mungkin kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan penggunaan perangkat lunak dan sistem informasi.

2.2 Analisis Keterlambatan dalam Pelaporan Tunjangan dan Pajak

Keterlambatan pelaporan tunjangan dan pajak di Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, proses pelaporan tunjangan anak yang masih manual sangat rentan terjadi kesalahan dan keterlambatan. Pegawai harus mengambil surat keterangan sekolah atau perguruan tinggi dari anak-anaknya dan menyerahkannya ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Proses ini memakan waktu dan kerap kali menimbulkan keterlambatan, terutama jika terdapat kendala dalam pengurusan surat keterangan atau proses administrasi di BPKAD. Selain itu, minimnya pengingat otomatis untuk melaporkan tunjangan setiap tahun juga turut menjadi penyebab keterlambatan tersebut. Jika pegawai lupa atau terlambat melapor, tunjangan bisa saja tidak diberikan lagi, yang berdampak buruk pada kesejahteraan keluarga pegawai.

3. Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan tunjangan dan pajak di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Pertama, pengembangan dan penerapan sistem pelaporan tunjangan dan pajak secara online menjadi solusi utama. Sistem ini memungkinkan pegawai untuk mengunggah dokumen terkait tunjangan anak, seperti surat keterangan sekolah atau perguruan tinggi, secara langsung melalui portal yang dikelola oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dengan adanya sistem ini, proses verifikasi data dapat dilakukan secara otomatis dan real time, sehingga mengurangi risiko kesalahan manual dan mempercepat waktu pemrosesan. Portal ini juga dapat dilengkapi dengan fitur pengingat otomatis agar pegawai dapat melaporkan tunjangan tepat waktu setiap tahunnya.

Dari sisi pelaporan pajak, meski kini sudah bisa dilakukan secara daring melalui DJP Online, masih terdapat kendala yang cukup berarti. Kesalahan input data kerap terjadi sehingga pegawai harus datang ke kantor pajak untuk melakukan pembetulan. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga mengganggu efisiensi kerja pegawai. Kurangnya pelatihan dan panduan yang jelas tentang penggunaan DJP Online juga menyebabkan banyak karyawan mengalami kesulitan dalam proses pelaporan, yang akhirnya menyebabkan keterlambatan. Karyawan yang terlambat melaporkan pajak akan dikenakan denda, yang akan menambah beban keuangan mereka.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan manfaat dan pajak di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung disebabkan oleh prosedur manual yang kurang efisien, kurangnya sistem pengingat otomatis, serta kurangnya pelatihan dan dukungan teknis pelaporan pajak online. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penerapan solusi teknologi informasi yang tepat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang memadai. Dengan demikian, efisiensi dan keakuratan pelaporan dapat ditingkatkan, sehingga keterlambatan dapat dikurangi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dapat terjamin

SIMPULAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung menghadapi masalah ketidakakuratan data dan keterlambatan pelaporan tunjangan dan pajak. Penyebab utama adalah human error, seperti kurangnya pemahaman pegawai tentang pentingnya akurasi data, kesalahan dalam memasukkan data, dan

tidak melakukan pengecekan ulang. Sistem pelaporan manual menyebabkan risiko hilangnya data karena ruang penyimpanan terbatas. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM membuat pegawai kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru. Survei dan wawancara menunjukkan bahwa sistem manual menyebabkan keterlambatan dan ketidakakuratan pelaporan, dengan kendala teknis dan kesalahan input data pada pelaporan pajak online melalui DJP Online.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ariana, I. Komang, and Luh Putu Rina Sari Putri. 2023. "IMPLEMENTASI PENGGUNAAN E-FORM PADA PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KANTOR KONSULTAN PAJAK (RIA TAX CONSULTANT)." *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7(2):278–90. doi: 10.33061/awpm.v7i2.9541.
- Akhadi, Iman. 2023. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 3(2). doi: 10.34208/ejatsm.v3i2.2120.
- Anon. 2024. "Kabupaten Badung." Retrieved (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Badung).
- Baharuddin, Ayu Amaliah, Muh. Ikhwan Musa, and Burhanuddin. 2022. "PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN SALES." *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*

- 1(1):55–62. doi: 10.56248/jamane.v1i1.13.
- Daud, Dahniyar, Hisnol Djamali, Haliah, Gunawan, Yudi Akhmad Sadeli, Abdul Rival, and Muhammad Alif. 2022. “Pelatihan Penyusunan Laporan dan Pelaporan Pajak untuk Koperasi Kabupaten Pindrang.” *Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5(Volume 5 No. 2 (Agustus 2022): 80-89):80–89.
- Erwin, Erwin, Annisa Fitri Mukti, and Loso Judijanto. 2024. *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (Teori, Prinsip dan Penerapan)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Research Gate.
- Hasanah, Uswatun, Evalina Pakpahan, Khamo Waruwu, Mella Yunita, and Muhammad Fadlan Siregar. 2021. “Penyuluhan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi Melalui Laman DJP Online.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 23–28.
- Maulida, Sofia, Sutardi, Rudy, Azwar, Wardhani Indah Sari, and Hedar Rusman. 2023. “PELATIHAN PENGISIAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR.” *PKM STIE Bisnis Indonesia* 2(Vol. 2 No. 2 (2023): Agustus):8. doi: <https://doi.org/10.58413/jkpkm.v2i2.392>.
- OCBC. 2022. “Tunjangan Adalah: Pengertian, Macam & Bedanya dengan Gaji.” *OCBC*. Retrieved (<https://www.ocbc.id/id/article/2022/11/16/tunjangan-adalah>).
- Rijal, Syamsu, Achmad Abdul Azis, Dhety Chusumastuti, Edy Susanto, I. Wayan Sugianta Nirawana, and Legito. 2023. “Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagi Masyarakat.” *Easta Journal of Innovative Community Services* 1(03):156–70. doi: 10.58812/ejincs.v1i03.123.
- Senastri, Khaula. 2024. “Mengetahui Keterbatasan Laporan Keuangan dan Cara Mengatasinya.” Retrieved (<https://accurate.id/akuntansi/keterbatasan-laporan-keuangan/>).
- Utami, Pri. 2023. “TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK: INOVASI DAN ADAPTASI MENUJU EFISIENSI DAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS.” *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 6(2):1–9. doi: 10.54783/japp.v6i2.726.
- Wibowo, Priyo Ari, and Albertus Tomi. 2020. “Perancangan Sistem Informasi Operating Time untuk Memudahkan Analisis Kinerja Mesin Secara Real Time.” *JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa)* 5(2):327. doi: 10.31544/jtera.v5.i2.2020.327-332.
- Yanti, Lia Dama, Yunia Oktari, Rina Aprilyanti, Jenni Jenni, and Rini Novianti. 2022. “Penyuluhan Kepatuhan Pelaporan Pajak dalam rangka pengabdian kepada masyarakat Pada Pemuda Tridharma Indonesia Cabang Wihara Dharma Pala.” *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2(1):40–45. doi: 10.32877/nr.v2i1.573.
- Yoga, I. Gusti Agung Prama, Cokorda Krisna Yudha, and I. Putu Gede Satria Wiraharja. 2023.

“Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Desa Sanur Kauh.”
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2(1):06–13. doi: 10.38142/ahjpm.v2i1.613.